



Pengembangan Civic Knowledge Melalui Gerakan Literasi Budaya dan Kewargaan

Lili Martina

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang, Indonesia
* lilimartina24@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 22th February 2023

Revised 15th August 2023

Accepted 4th Sept 2023

Keywords:

Civic knowledge

Cultural literacy

Civic literacy

ABSTRACT

The inadequate reading proficiency, skill, and interest among students have been linked to a deficiency in their civic knowledge. This circumstance is notably evident at SMAN 7 Padang. This study addresses this concern by employing qualitative research methods. Data collection involved observation, interviews, and documentation techniques, while analysis comprised data reduction, presentation, and verification. The findings highlight that enhancing civic knowledge among students at SMAN 7 Padang can be achieved through specific measures: 1) adopting problem-based learning in civic education, 2) hosting quiz competitions focusing on the four pillars of nationality, 3) fostering a culture of literacy, and 4) leveraging the resources available in school libraries. Challenges faced by civic education teachers include student diversity, limited time allocation, and suboptimal classroom management. Notably, this research primarily explores internal school strategies for implementing civic knowledge, acknowledging the need for further research to delve into the impact of extracurricular activities on this endeavor.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Lili Martina
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
lilimartina24@gmail.com

PENDAHULUAN

Gerakan literasi di Indonesia sudah ditegaskan oleh pemerintah untuk siswa. Hal ini terlihat dari definisi literasi yang secara resmi disebutkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2017 sebagai kemampuan mengartikan informasi secara kritis. Namun, tidak hanya itu, literasi juga mencakup: apresiasi berbagai bentuk komunikasi seperti lisan, teks tercetak, media penyiaran, dan media digital (Dunphy & Dwyer, 2012). Literasi juga dilihat sebagai suatu praktik dan hubungan sosial ideologi suatu bangsa dan budaya (Yusuf, Sanusi, Razali, Maimun, Putra, & Fajri, 2020).

Beberapa pemeringkat yang mengukur kemampuan membaca siswa di dunia memperlihatkan bahwa kompetensi literasi siswa di Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia menduduki peringkat ke-57 dari 65 negara dalam *Progress in International Reading Literacy Study* pada tahun 2011. Sementara itu, standar lainnya melalui *Program for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara dalam hal kemampuan literasi. Rendahnya kemampuan ini menggambarkan bahwasanya proses pendidikan belum efektif dalam meningkatkan minat baca dan pengetahuan siswa.

Untuk menyikapi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan Budi Pekerti. Dalam pengimplementasiannya, gerakan literasi sekolah merupakan bagiannya. Melalui Permendikbud ini, sekolah menginisiasi aktivitas membaca 15 menit sebelum masuk ke materi pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu bentuk strategi dalam menumbuhkan budi pekerti melalui budaya literasi.

Budaya literasi tersebut dapat sejalan dengan penanaman pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Melalui pengembangan *civic knowledge* ini, diharapkan siswa dapat mengetahui, memahami serta mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dari proses literasi tersebut. Tindakan ini diharapkan agar siswa dapat menjadi warga Negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) yang paham akan hak dan kewajibannya. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa untuk dapat mengatasi fenomena disinformasi pada generasi millennial dapat diperbaiki dengan adanya pengolahan informasi yang baik (Pratiwi & Komaril Asyarotin, 2019). Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mampu memperkuat literasi budaya dan kewargaan, selain mata pelajaran IPS dan Seni Budaya (Setiawan, 2020). Selain itu, sekolah juga berperan dalam meningkatkan budaya literasi karena peserta didik mendapatkan bimbingan langsung dari Bapak/Ibu guru (Aisyah, 2021).

Di Sumatera Barat sendiri, strategi melalui pendidikan literasi dan seni terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Febriani, 2019). SMAN 7 Padang merupakan salah satu sekolah di Sumatera Barat yang juga sedang mengembangkan kegiatan literasi, namun melalui mata pelajaran PPKn. PPKn dilihat mampu meningkatkan pengetahuan kewargaan siswa. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn untuk dapat mengembangkan *civic knowledge* siswa di SMAN 7 Padang? Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam mengembangkan *civic knowledge*?

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus merupakan metode penelitian yang berupaya menginvestigasi fenomena dalam waktu dan kegiatan tertentu, yang dapat berupa: program, peristiwa, proses, institusi, atau kelompok sosial. Peneliti mengumpulkan informasi yang rinci dan mendalam dari waktu ke waktu dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Kusmarni, 2012). Penelitian jenis ini dipilih

karena dapat memperoleh pengetahuan yang bersifat mendalam terkait dengan bagaimana upaya serta hambatan yang dirasakan oleh guru PPKn dalam pengembangan *civic knowledge* melalui program gerakan literasi budaya dan kewargaan di SMAN 7 Padang.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari: kepala sekolah, wakil sarana dan prasarana, kepala perpustakaan, 2 orang guru mata pelajaran PPKn serta siswa kelas XI sebanyak 15 orang. Total jumlah informan adalah 20 orang yang menjadi sumber data primer. Sumber data primer berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder ialah dokumentasi berupa profil SMA, foto-foto, serta arsip-arsip yang terkait dengan SMAN 7 Padang. Kemudian, data yang peneliti peroleh diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data, dan upaya penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Civic knowledge berhubungan dengan hak dan kewajiban individu sebagai warga Negara. Pengembangan pengetahuan kewarganegaraan ini diharapkan dapat membentuk pola pikir kritis, nilai-nilai kepedulian, persatuan dan kesatuan agar mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang tidak biasa. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang fundamental karena bertujuan untuk membentuk, membina, memperkuat moral, akhlak, dan budi pekerti yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Menurut (Alouw, 2021) menjelaskan bahwa penguatan dan pengembangan pengetahuan kewarganegaraan adalah tugas dari guru mata pelajaran PPKn dengan cara meningkatkan kembali pengetahuan yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Penggunaan Metode Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran PPKn

Menurut (Alouw, 2021) menyebutkan bahwa usaha untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut sebagai upaya guru mata pelajaran. Guru PPKn di SMAN 7 Padang telah berupaya untuk dapat mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan siswa melalui program gerakan literasi budaya dan kewargaan, diantaranya adalah dengan menggunakan metode *Problem Based Learning* (PBL) dalam pembelajaran. Penggunaan metode PBL dapat memberikan pemahaman mengenai masalah-masalah pengetahuan kewarganegaraan dengan mendorong siswa untuk mengenal bagaimana cara belajar dan bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Siswa juga didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan dan sumber bacaan lainnya.



Gambar 1. Proses Investigasi dan Pengumpulan Informasi yang diperlukan untuk Pemecahan Masalah.

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang diawali dengan mengajukan masalah dan diakhiri dengan pemecahan masalah (Rizqiyani, 2022). Metode PBL ini memfokuskan pada penyelesaian masalah dan mengharuskan siswa untuk dapat mencari informasi dan membaca materi untuk dapat memahami masalah dan menemukan solusi. Secara tidak langsung, hal ini mampu menumbuhkan minat baca dan memudahkan siswa untuk dapat memahami isu-isu yang berhubungan dengan kewarganegaraan.

Pemilihan pendekatan PBL dalam pembelajaran PPKn karena beberapa kelebihan yang dimilikinya diantaranya: 1) pemecahan masalah yang ditawarkan dapat membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa dan memberikan kepuasan dalam mempelajari informasi baru, 2) lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa, 3) meningkatkan keaktifan siswa dan 4) memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri (Dewi, 2018).

Menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Kebangsaan

Cerdas cermat adalah metode pengajaran yang menggunakan kompetisi untuk menarik minat siswa terhadap suatu materi (Oktarianti, 2021). Dengan menggunakan metode ini, kemampuan siswa akan dievaluasi dari seberapa cepat dan tepat mereka menjawab pertanyaan. Teknik cerdas cermat memungkinkan guru untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir siswa melalui penggunaan pertanyaan dan penyampaian jawaban yang cepat dan tepat.



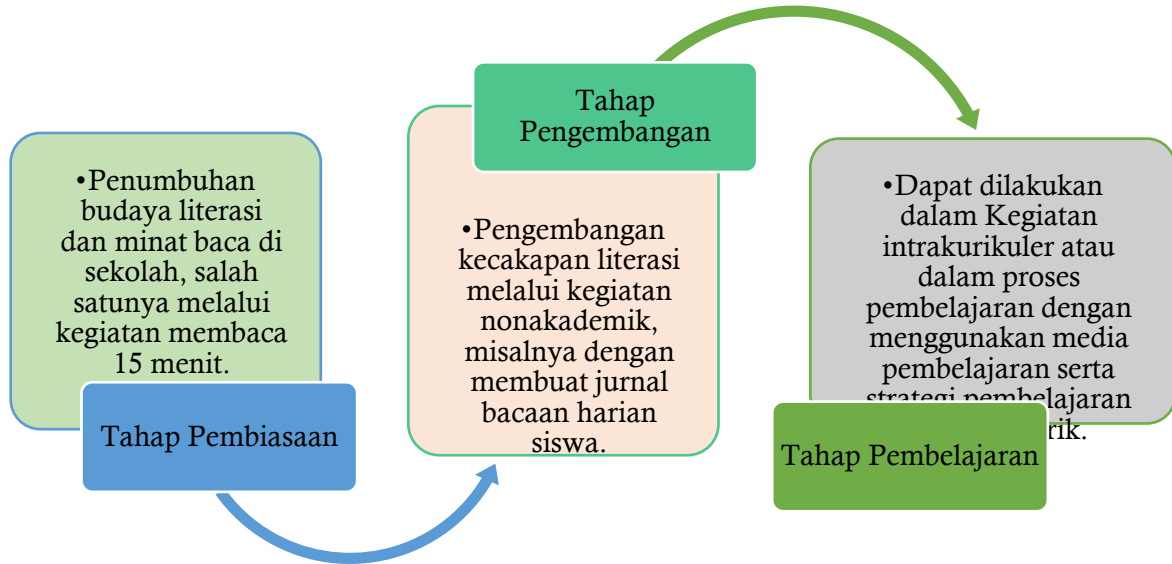
Gambar 2. Pelaksanaan LCC 4 Pilar Kebangsaan
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Adapun materi yang dilombakan dalam LCC 4 pilar kebangsaan ini ialah: TAP MPR RI, sistem pemerintahan, konstitusi, dan sejarah ketatanegaraan. LCC terdiri dari beberapa babak, yakni: menjelaskan secara tematik yang bertujuan untuk melihat pemahaman terhadap materi, cara menyampaikan, ketepatan penggunaan waktu dan detail jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan babak benar salah (rebutan). Pertanyaan dalam perlombaan ini dibuat langsung oleh tim dewan juri yang berkompeten di bidang ilmu kewarganegaraan dan kajian Pancasila yakni para dosen yang berasal dari prodi PPKn UNP. Teknik ini dinilai mampu menciptakan suasana belajar yang tidak monoton dan menyenangkan yang membuat minat belajar siswa menjadi tinggi. Pendekatan melalui permainan dinilai lebih efektif dalam meningkatkan rasa keingintahuan dan pengalaman siswa.

Mengembangkan Budaya Literasi

Program Gerakan Literasi Sekolah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berguna untuk mengembangkan kebiasaan membaca dan kemampuan pemahaman siswa. Guru, siswa, dan keluarga adalah beberapa komponen yang dapat menunjang program tersebut (Handayani, 2020). Di dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah ini terdapat 3 tahapan strategi pengembangan, diantaranya yaitu: pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran (Sutrianto, 2016).

Adapun skema terkait dengan strategi penguatan dan pelaksanaan literasi budaya dan kewargaan yang dilakukan oleh guru PPKn di SMAN 7 Padang, ialah sebagai berikut :



Gambar 3. Skema Strategi Penguatan Dan Pelaksanaan Literasi Budaya Dan Kewargaan
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Kegiatan membaca selama 15 menit merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Siswa disuruh untuk melaporkan buku yang dibacanya dan refleksi atas bacaan tersebut. Kegiatan membaca ini harus diketahui oleh orang tua siswa. Berikut adalah contoh jurnal bacaan harian siswa SMAN 7 Padang :

JURNAL BACAAN HARIAN PESERTA DIDIK
SMAN 7 PADANG

Nama : Raisa Analista
Kelas : XI F.6

No.	TANGGAL BACA	JENIS BACAAN	JUDUL BUKU	RINGKASAN	REFLEKSI DIRI	PARAF ORTU
1	25 Juli 2022	Cerita Lokal	David wijaya 2021. 126 Cerita Nusantara Jakarta - PT Exelx Media Komputindo	(A) Putri Pukes dan Danau Laut Tawar (Aceh) Bercerita tentang kisah Seorang putri pukes yg Ingin menikah . Namun tak diestui oleh kedua orang tua. Namun , Suatu hari akhirnya Orang tua Putri Pukes mered- a Peuhah tetapi , putri Pukes melanggarnya dan ia berubah menjadi batu . Karena hujan yang lebat tempat itu terus tergenang air dan berubah menjadi danau yang disebut dengan danau Laut Tawar.	Dari Cerita Putri Pukes dan Danau Laut Tawar ini , saya belajar untuk terus selalu mendengarkan nasehat serta peuhah - peuhah yang dibrikan oleh orang tua saya . Nasehat tersebut baik untuk saya agar saya dapat tumbuh menjadi orang yang patuh kepada orang tua .	
2	27 Juli 2022	Cerita Lokal	David wijaya 2021. 120 Cerita Nusantara Jakarta	(B) Putra Mahkota Amat Nide Aceh) Cerita ini bercerita tentang	Dari Cerita ini saya belajar untuk selalu berbuat baik kepada siapapun , walaupun	

Gambar 4. Jurnal Bacaan Harian Peserta Didik SMAN 7 Padang
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Pemanfaatan Peran Perpustakaan Sekolah

Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu dalam rangka mengembangkan *civic knowledge* siswa dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi (Effendy, 2017). Di SMAN 7 Padang usaha ini dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menjadi sarana dan prasarana yang berguna sebagai pusat sumber ilmu. Para guru dan siswa dapat menemukan berbagai pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Perpustakaan berkontribusi pada peningkatan minat baca, yang diharapkan dapat menghasilkan generasi yang kritis dalam melihat berbagai persoalan kewarganegaraan. Di SMAN 7, guru mewajibkan siswa untuk membaca buku di luar buku pegangan siswa. Pihak sekolah menyediakan koleksi bacaan terbaru sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses pengembangan *civic knowledge*.

Hambatan-hambatan Guru PPKn dalam Mengembangkan *Civic Knowledge* Siswa

Hambatan yang dialami oleh mata pelajaran PPKn secara umum ialah berkenaan dengan penggunaan aspek kognitif yang masih dominan dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk menciptakan siswa yang kritis dan bertanggung jawab masih belum terealisasi dengan baik (Widiatmaka, 2016). Padahal faktanya, dalam pembelajaran PPKn perlu untuk melihat aspek lainnya, yaitu berkenaan dengan penguasaan *civic skill dan civic disposition*.

Hambatan dalam mengembangkan *civic knowledge* siswa ini ialah karakteristik dan latarbelakang serta kemampuan siswa yang berbeda-beda. Perbedaan ini terlihat dari bagaimana guru PPKn memilih serta menggunakan metode dan strategi pada kelas IPA dan IPS. Selain itu motivasi siswa yang rendah membuat mereka jadi kurang memperhatikan pelajaran. Sehingga dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh guru banyak memakan durasi waktu yang lama. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya. Tentu hal ini juga berkaitan dengan kurangnya penguasaan teori serta perluasan sumber bacaan yang dimiliki oleh peserta didik.

Selain itu, hambatan lainnya adalah keterbatasan waktu pembelajaran yang tidak sebanding dengan banyaknya materi yang akan diajarkan oleh guru PPKn di dalam kelas. Hal ini membuat guru PPKn mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajarannya. Sehingga dalam proses pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan dan karakter siswa masih belum bisa dibangun secara maksimal. Waktu di dalam dunia pendidikan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan guru serta siswa. Mengatur waktu secara efisien dan efektif bukan suatu hal yang mudah, apalagi berupaya untuk menaatinya secara konsisten.

Berdasarkan informasi dari guru PPKn di SMAN 7 Padang, kemampuan siswa yang lambat dalam menerima pelajaran juga menjadi faktor penghalang dalam mengembangkan *civic knowledge*. Kegiatan belajar dan mengajar memerlukan interaksi timbal balik yang terjadi antara guru dan siswa di dalam kelas. Siswa yang pasif dan tidak disiplin menjadi hambatan yang dirasakan oleh guru PPKn dalam mengembangkan program gerakan literasi budaya dan kewargaan.

Guru juga mengalami hambatan dalam pengelolaan kelas. Keterampilan guru dalam menghadapi gangguan, seperti: dalam menghadapi yang membuat keributan di kelas, juga dibutuhkan. Apabila terjadi gangguan saat proses pembelajaran guru diharapkan dapat menciptakan kondisi optimal yang dapat mendukung pembelajaran. Namun keterampilan ini belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kerjasama antara guru mata pelajaran dengan pihak sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan *civic knowledge* siswa melalui program gerakan literasi budaya dan kewargaan di SMAN 7 Padang dilakukan dengan berbagai cara yakni: 1) penggunaan metode *problem based learning* dalam pembelajaran PPKn, 2) menyelenggarakan lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, 3) mengembangkan budaya literasi, dan 4) pemanfaatan peran perpustakaan sekolah. Namun terdapat hambatan bagi guru PPKn, yaitu: 1) adanya perbedaan karakteristik siswa itu sendiri, 2) pengalokasian waktu yang terbatas, dan 3) pengelolaan kelas yang belum kondusif. Hal ini menjadikan pengembangan *civic knowledge* melalui program gerakan literasi budaya dan kewargaan dirasakan masih kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatannya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan belum maksimal, hanya terbatas dalam pengembangan program literasi di internal sekolah. Pada praktiknya kegiatan ekstrakurikuler juga dapat membantu pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa.

REFERENSI

- Aisyah, S. (2021). *Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Literasi Budaya Menyongsong Era Revolusi 4.0 di SMKN 3 Banjarbaru*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10(1), 49-56.
- Alouw, M. A., Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2021). *Upaya Guru Dalam meningkatkan Civic Knowledge Siswa Pada Mata Pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Langowan*. Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan kewarganegaraan, 1(1), 36-47.
- Dewi, N. (2018). *Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII A SMP Mutiara Singaraja Pada Mata Pelajaran PKn*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 6(1), 28-39.
- Effendy, M. (2017). *Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Febriani, R. (2019). *Strategy of Literacy and Art Education in Creating Critical Thinking in West Sumatra*. In Proceedings of the first International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, September 5-6 2018, Padang, Indonesia.
- Handayani, T. U. (2020). *Penguatan Budaya Literasi sebagai Upaya Pembentukan Karakter*. Literasi : Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Serta Pembelajaran, 4(1).
- Kemendibud. (2015). *Buku Panduan Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusmarni, Y. (2012). *Studi Kasus*. UGM Jurnal Edu UGM Press.
- Oktarianti, D., Herlissha, N., & Zahri, T. (2021). *Implementasi Fungsi-Fungsi Management Pada Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan Dalam Membentuk Keadaban Publik*. Seminar Nasional Kewarganegaraan 3(1), 119-125.
- Pratiwi, A., & Komaril Asyarotin, E. (2019). *Implementasi Literasi Budaya Dan Kewargaan Sebagai Solusi Disinformasi Pada Generasi Millennial Di Indonesia*. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan 7 (1), 126-130.

Rizqiyani, E., Dewi, R., & Legiani, W. (2022). *Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Civic Knowledge*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 227-240.

Setiawan, B. (2020). *Pengembangan Mata Pelajaran untuk Memperkuat Literasi Budaya dan Kewargaan*. *Jurnal Masyarakat Indonesia* 46 (1), 80-92.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrianto, D. (2016). *Panduan Gerakan Literasi Sekola Di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Widiatmaka, P. (2016). *Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Di Dalam Proses Pembelajaran*. *Jurnal Civics*, 13(2), 188-198.

Yusuf, R., Sanusi, Razali, Maimun, Putra, I., & Fajri, I. (2020). *Tinjauan Literasi Budaya Dan Kewargaan Siswa SMA se-Kota Banda Aceh*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 91-99.